

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jember (POLIJE) merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang berfokus pada pembelajaran berbasis praktik untuk mencetak lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Salah satu jurusan yang ada di POLIJE adalah Jurusan Teknologi Informasi, yang menaungi Program Studi Teknik Komputer. Program studi ini membekali mahasiswa dengan berbagai kompetensi, seperti pengoperasian server berbasis Linux, pembuatan perangkat lunak dan keras berbasis *Internet of Things* (IoT), serta pelatihan jaringan komputer menggunakan perangkat Cisco dan Mikrotik.

Selama empat semester pertama, mahasiswa mendapatkan pembelajaran melalui kegiatan teori di kelas dan praktik dilaboratorium. Setelah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup, mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang industri pada semester lima. Kegiatan magang ini menjadi jembatan antara dunia akademik dan dunia kerja, agar mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara nyata di lapangan.

Magang memiliki peran penting dalam proses pembelajaran mahasiswa karena melalui kegiatan ini, mereka dapat belajar beradaptasi dengan budaya kerja, memahami struktur organisasi, serta mengasah kemampuan komunikasi dan kerja sama tim. Selain itu, magang juga menjadi kesempatan untuk memperluas jaringan profesional sekaligus mengenal tantangan dunia kerja yang sesungguhnya.

Dalam kegiatan magang ini, penulis ditempatkan di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III (Bakorwil III Malang). Bakorwil III Malang merupakan instansi pemerintah daerah di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berfungsi membantu Gubernur dalam mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kerja yang meliputi beberapa kabupaten dan kota. Lembaga ini juga berperan dalam pembinaan, pengawasan, serta sinkronisasi program pembangunan daerah agar selaras dengan kebijakan provinsi.

Melalui penempatan di Bakorwil III Malang, penulis berkesempatan untuk memahami secara langsung bagaimana penerapan teknologi informasi, khususnya dalam pengelolaan dan pemetaan jaringan komputer yang mendukung aktivitas administrasi pemerintahan. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal berharga dalam meningkatkan kemampuan profesional dan kesiapan menghadapi dunia kerja di masa depan.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang

1.2.1 Tujuan Umum Magang

Kegiatan magang merupakan bagian penting dari proses pembelajaran di Politeknik Negeri Jember yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengenal secara nyata bagaimana dunia kerja beroperasi, baik dalam hal teknis, administrasi, maupun etika profesional. Selain itu, magang juga diharapkan menjadi sarana pembentukan karakter, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam menghadapi berbagai situasi kerja yang sesungguhnya.

1.2.2 Tujuan Khusus

Pelaksanaan magang di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang memiliki beberapa tujuan khusus, antara lain:

- a. Memahami sistem kerja, struktur organisasi, dan tata kelola yang diterapkan di lingkungan instansi pemerintahan daerah.
- b. Melakukan analisis kebutuhan serta pemetaan jaringan komputer guna mengetahui kondisi infrastruktur teknologi informasi yang tersedia di Bakorwil III Malang.
- c. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan di bidang jaringan komputer, seperti perancangan topologi jaringan, manajemen perangkat, serta optimasi konektivitas.
- d. Melatih kemampuan kerja sama, komunikasi, serta adaptasi dalam lingkungan kerja profesional.

1.2.3 Manfaat Magang

Kegiatan magang memberikan manfaat yang besar, baik bagi mahasiswa maupun bagi instansi tempat magang berlangsung.

a. Bagi Mahasiswa

Magang menjadi sarana pembelajaran praktis yang memperluas wawasan dan menambah keterampilan di bidang teknologi informasi, khususnya jaringan komputer. Melalui pengalaman langsung di lapangan, mahasiswa dapat memahami tantangan kerja, meningkatkan kedisiplinan, serta mengasah kemampuan problem solving yang dibutuhkan di dunia profesional.

b. Bagi Politeknik Negeri Jember

Kegiatan magang memberikan manfaat yang signifikan bagi Politeknik Negeri Jember sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan vokasi. Melalui pelaksanaan magang, Politeknik memperoleh umpan balik langsung dari dunia kerja mengenai kompetensi yang dibutuhkan oleh industri dan instansi pemerintahan. Hasil tersebut menjadi dasar evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan pasar kerja. Selain itu, kegiatan magang juga memperkuat kerja sama antara Politeknik Negeri Jember dan mitra dunia usaha maupun dunia industri, yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran berbasis praktik, pengembangan riset terapan, serta perluasan peluang penyerapan lulusan di dunia kerja.

c. Bagi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang (Bakorwil III Malang)

Kegiatan magang juga memberikan manfaat nyata bagi Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur III Malang (Bakorwil III Malang) sebagai instansi tempat pelaksanaan magang. Melalui kegiatan ini, Bakorwil III Malang memperoleh dukungan tenaga terampil dari mahasiswa yang dapat membantu pelaksanaan tugas teknis, khususnya dalam bidang analisis kebutuhan dan pemetaan jaringan komputer.

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja

Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan magang dilaksanakan di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang, yang beralamat di Jl. Simpang Ijen No. 2, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. Lokasi ini berada di kawasan pusat pemerintahan Kota Malang dan menjadi salah satu instansi di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berperan penting dalam mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kerja Malang Raya dan sekitarnya.

Selama kegiatan magang, mahasiswa mengikuti jadwal kerja yang telah ditetapkan oleh pihak instansi. Secara umum, waktu kerja dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB setiap hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat. Namun, terdapat ketentuan khusus pada hari Senin, di mana seluruh pegawai dan peserta magang diwajibkan hadir lebih awal, yaitu pukul 07.55 WIB, untuk mengikuti kegiatan apel pagi yang merupakan agenda rutin sebelum memulai aktivitas kerja.

Tabel 1. 1 Jadwal Magang

Hari	Jam / Waktu
Senin	07.55 – 16.00 WIB
Selasa	08.00 – 16.00 WIB
Rabu	08.00 – 16.00 WIB
Kamis	08.00 – 16.00 WIB
Jumat	08.00 – 16.00 WIB

1.3.1 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan magang oleh mahasiswa Program Studi Teknik Komputer, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember di Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang dilakukan secara berkelompok, dengan pendampingan langsung dari pegawai yang ditunjuk sebagai pembimbing lapang. Kegiatan ini merupakan magang wajib bagi

mahasiswa jenjang Diploma III, yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata serta meningkatkan kemampuan profesional dalam penerapan ilmu jaringan komputer di lingkungan pemerintahan. Metode pelaksanaan kegiatan magang meliputi beberapa tahapan berikut:

- a. Pengenalan Instansi, yaitu tahap awal yang diberikan oleh pembimbing lapang untuk menjelaskan struktur organisasi, fungsi, serta peran Bakorwil III Malang sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam koordinasi dan pembinaan wilayah. Pada tahap ini juga dijelaskan deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa magang.
- b. Diskusi dan Pembimbingan Teknis, yaitu kegiatan interaktif antara mahasiswa dan pembimbing lapang guna memahami mekanisme kerja, prosedur teknis, serta tata cara pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan analisis kebutuhan dan pemetaan jaringan komputer di lingkungan instansi.
- c. Pencatatan Kegiatan Harian (Log Book), yaitu kegiatan pendokumentasian aktivitas magang secara rutin setiap hari. Log book digunakan untuk mencatat pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dan pelaporan harian mahasiswa kepada pembimbing lapang maupun dosen pembimbing akademik.
- d. Pembagian Tugas dan Penempatan, di mana mahasiswa dibagi menjadi beberapa subkelompok sesuai kebutuhan kegiatan, meliputi pekerjaan lapangan seperti observasi jaringan dan pendataan perangkat, serta pekerjaan administratif seperti penyusunan laporan hasil pengamatan.
- e. Studi Pustaka dan Analisis Data, yaitu kegiatan pencarian literatur serta referensi ilmiah yang relevan dengan topik magang. Hasil studi ini digunakan sebagai dasar penguatan teori untuk mendukung analisis dan penyusunan laporan akhir kegiatan magang.

BAB II KEADAAN UMUM PERUSAHAAN INSTANSI

2.1 Sejarah Perusahaan BAKORWIL III Malang



Gambar 2.1 Logo BAKORWIL III Malang

Lembaga Koordinasi Wilayah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, berawal sejak masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu, sistem pemerintahan bersifat sangat sentralistik, di mana seluruh urusan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dikendalikan langsung oleh Gouverneur Generaal. Tugas koordinasi wilayah dijalankan oleh pejabat pusat yang disebut Resident, yang berperan sebagai Kepala Wilayah Pemerintahan Karesidenan. Resident memperoleh delegasi kewenangan dari pemerintah pusat dan bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya (Sutatak et al., n.d.).

Pada tahun 1922, Pemerintah Belanda menerapkan kebijakan Bestuurs hervorming Wet atau Perubahan Tata Pemerintahan. Berdasarkan aturan tersebut, kedudukan Resident diubah menjadi kepala pemerintahan wilayah yang mewakili Gouverneur, dengan tugas mengawasi aparat kabupaten dan pelaksanaan pemerintahan di bawahnya. Jabatan Gouverneur dan Resident hanya dijabat oleh bangsa Belanda, sedangkan jabatan di tingkat bawah seperti Asisten Resident hingga Aspirant Controleur mulai diisi oleh pribumi.

Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), struktur pemerintahan diubah dan fungsi Resident dikembalikan seperti pada tahun 1854. Kepala wilayah karesidenan disebut Syuu Cokan, pejabat Jepang yang memimpin 17 wilayah administratif (Syuu) di Jawa dan Madura. Mereka bertugas menjalankan undang-

undang, mengatur administrasi pemerintahan, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setelah Indonesia merdeka, jabatan Resident tetap berperan penting sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Berdasarkan berbagai ordonansi, Resident memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengawasan terhadap daerah. Namun, sistem ini berubah seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang menempatkan tugas koordinasi wilayah provinsi di bawah Pembantu Gubernur.

Di Jawa Timur, pelaksanaan kebijakan ini diperkuat melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 640 Tahun 1988, sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1978. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa Pembantu Gubernur bertugas membantu Gubernur dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan membina penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di wilayah kerja masing-masing.

Memasuki era reformasi, terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghapus lembaga pembantu gubernur dan memberikan otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi berperan sebagai koordinator dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan lintas daerah, guna menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Wilayah Provinsi Jawa Timur. Salah satu di antaranya adalah Bakorwil III Malang, yang dibentuk untuk memperkuat koordinasi pemerintahan dan pembangunan antar daerah di wilayah selatan Jawa Timur.

Pembentukan Bakorwil III Malang didasari oleh beberapa pertimbangan penting, antara lain:

1. Perlunya memperkuat rentang kendali pemerintahan karena luasnya wilayah dan beragamnya kondisi geografis serta sosial budaya di Jawa Timur.
2. Masih adanya keterbatasan sumber daya dan kewenangan di daerah yang memerlukan fasilitasi dari pemerintah provinsi.
3. Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik agar sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Landasan hukum yang menjadi dasar operasional Bakorwil III Malang diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Bakorwil III Malang berperan sebagai perpanjangan tangan Gubernur Jawa Timur dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kerjanya. Wilayah koordinasi Bakorwil III meliputi sejumlah kabupaten dan kota di kawasan selatan Jawa Timur, termasuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Melalui lembaga ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Sutatak et al., n.d.).

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong

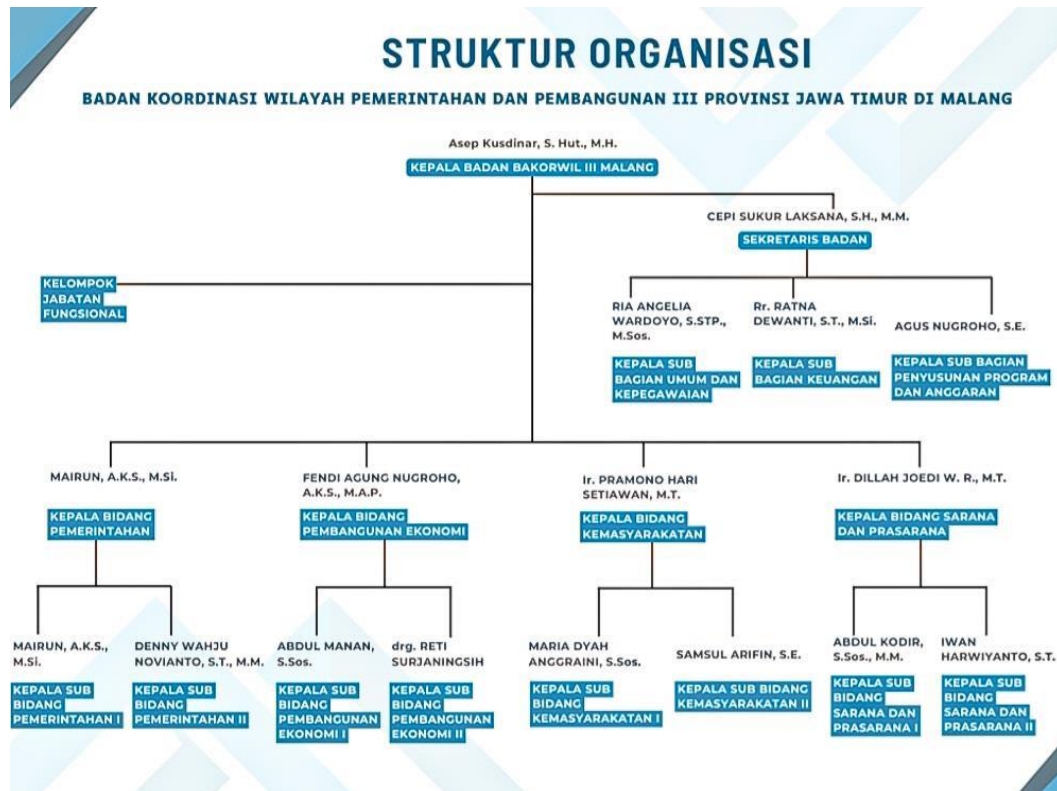
2.2.2 Misi

- a. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah

- b. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
- c. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
- d. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

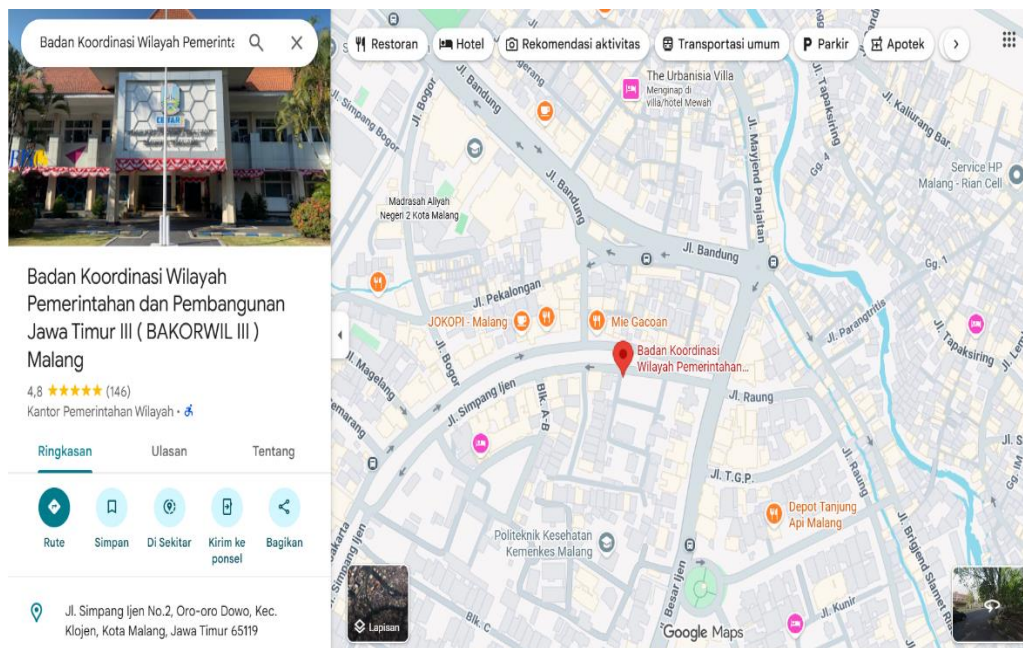
Berikut ini Berikut ini merupakan struktur organisasi di Bakorwil III Malang yang menggambarkan susunan jabatan dan hubungan kerja mulai dari Kepala Bakorwil III Malang hingga unit-unit kerja yang berada di bawahnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing :



Gambar 2.2 Struktur Organisasi BAKORWIL III MALANG

2.4 Kondisi Lingkungan

Lingkungan kerja di Bakorwil III Malang berada dalam kawasan perkantoran pemerintah yang tertata rapi dan kondusif untuk mendukung aktivitas administrasi maupun koordinasi lintas daerah. Gedung kantor berlokasi di Jl. Simpang Ijen No. 2, Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang merupakan salah satu kawasan strategis dan mudah diakses, dikelilingi oleh fasilitas umum seperti perkantoran, pusat layanan publik, serta area komersial. Kondisi bangunan kantor terawat dengan baik, dilengkapi ruang kerja yang tertata sesuai fungsi tiap bidang, ruang rapat, area layanan publik, serta halaman yang cukup luas untuk kegiatan apel, parkir, dan kegiatan operasional lainnya.



Gambar 2.3 Alamat Lokasi Magang

Terwujudnya Secara umum, lingkungan kerja di Bakorwil III Malang bersifat formal dan profesional, mencerminkan karakter lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi koordinatif, pembinaan, serta pengawasan terhadap kabupaten dan kota di wilayah kerjanya. Interaksi antarpegawai berlangsung dengan tertib dan komunikatif, dengan budaya kerja yang menekankan kedisiplinan, ketepatan waktu, dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku.

Selain itu, kondisi lingkungan sekitar kantor cukup tenang dan jauh dari kebisingan berlebih, sehingga mendukung efektivitas kerja dan kenyamanan bagi pegawai maupun tamu yang datang. Lingkungan fisik dan budaya kerja ini secara keseluruhan memberikan suasana yang stabil, aman, dan profesional, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan magang maupun aktivitas operasional instansi.